

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI
INDEPENDENT AGENCIES DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN
INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

Rico Riando

NIM. 401.14.11.088

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2018**

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI
INDEPENDENT AGENCIES DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN
INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Bangka Belitung**



Oleh:

Rico Riando

NIM. 401.14.11.088

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2018**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rico Riando

N.I.M : 401.14.11.087

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi :

**“Implementasi Tugas Dan Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai
Independent Agencies Dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia”**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis,



Rico Riando

HALAMAN PERSETUJUAN

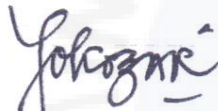
IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI *INDEPENDENT AGENCIES* DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

SKRIPSI

Oleh:
Rico Riando
NIM. 401.14.11.088
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama



(Yokotani S.H., M.H.)
NP.606206003

Pembimbing Pendamping



(Darwance S.H., M.H.)
NP.608816033

Mengetahui
A.n Ketua Jurusan Hukum
Sekretaris Jurusan Hukum
Fakultas Hukum



(Rio Armanda Agustian S.H., M.H.)
NP.608410029

HALAMAN PENGESAHAN


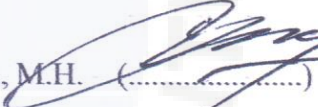
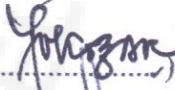
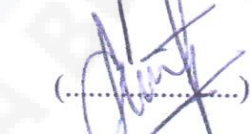
IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI *INDEPENDENT AGENCIES* DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

SKRIPSI

Oleh:
Rico Riando
NIM. 401.14.11.088
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
pada Tanggal 27 Juli 2018
dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

1. Ketua : Syamsul Hadi, S.H., M.H.
NP. 606007014  (.....)
2. Sekretaris : Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.
NP. 608410029  (.....)
3. Anggota : Yokotani, S.H., M.H.
NP. 6062066003  (.....)
4. Anggota : Toni, S.H., M.H.
NP. 608010028  (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung


Syamsul Hadi, S.H., M.H.
NP. 606007014

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Hidup selalu ada pilihan, tetapi kita yang menentukan pilihan itu”

Skripsi ini dengan sepenuh hati saya persembahkan kepada:

- Kedua orang tua sekaligus sebagai guru dan panutanku, ayahku Muhamad Yadi dan Ibunda Ratih Susanti yang sepanjang masa telah mendo'akan serta berusaha dan mendukung dalam segala kemampuan yang ada untuk kebutuhanku.
- Kakak dan adik-adikku tercinta dan tersayang yang telah memberi semangat dan dukungan untuk keberhasilanku.
- Keluarga besarku yang selalu mendo'akan dan memotivasi saya.
- Sahabat dan teman-temanku yang saling memotivasi dan menguatkan.
- Semua saudara-saudaraku dan teman-teman senasip dan seperjuangan yang selalu memberikan inspirasi, kawan seperjuangan Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum.

ABSTRAK

Rico Riando

4011411088

IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI *INDEPENDENT AGENCIES* DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Skripsi, Fakultas Hukum, 2018

Kata Kunci: KPK, Komisi Negara Independen, Tugas, Fungsi

Penulisan ini membahas tentang implementasi tugas dan fungsi komisi pemberantasan korupsi (KPK) sebagai komisi negara independen (*independent agencies*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. KPK merupakan suatu lembaga yang penting dalam menangani masalah korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa. Dalam penulisan skripsi ini mengangkat permasalahan tentang implementasi tugas dan fungsi KPK sebagai *independent agencies* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan penghambat implementasi tugas dan fungsi KPK sebagai *independent agencies*. Penulisan ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual yang menganalisa perundang-undangan dan pandangan atau doktrin dalam ilmu hukum. Tulisan ini menghasilkan bahwa KPK merupakan suatu lembaga yang dibentuk melalui undang-undang yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya terdapat ketidakcermatan dan kesesuaian dalam proses penyidikan sehingga perlu adanya evaluasi untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya. Walaupun merupakan lembaga independen KPK mempunyai faktor penghambat dalam menjalankan tugasnya antara lain keterbatasan personil KPK untuk melingkup seluruh wilayah negara Indonesia, rivalitas sesama penegak hukum yang seharusnya menjadi rekan dan bukan menjadi saingan terhadap sesama penegak hukum dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan dan ranah masing-masing instansi penegak hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, pembatasan hak penyadapan yang merupakan cara paling efektif dalam menindak dan menjadi bukti saat di pengadilan yang dinilai melanggar hak privasi orang lain, citra buruk oknum KPK sendiri yang membuat jatuhnya kualitas dari instansi KPK.

ABSTRACT

Rico Riando

4011411088

IMPLEMENTATION OF ASSIGNMENT AND FUNCTION OF THE COMMISSION OF CORRUPTION ERADICATION AS INDEPENDENT AGENCIES IN SYSTEM OF INDONESIAN RELIABILITY

Undergraduate Thesis, Faculty of Law, 2018

Key words : KPK, Independent Agencies, Duties, Functions

This writing discusses the implementation of duties and functions of the corruption eradication commission (KPK) as an independent state commission (independent agencies) in the Indonesian state administration system. KPK is an important institution in handling corruption problem which is an extraordinary crime. In writing this essay raises the problem about the implementation of KPK duties and functions as an independent agency in the Indonesian state administration system and impedes the implementation of KPK duties and functions as an independent agency. This writing, using normative juridical research methods with a legal and conceptual approach that analyzes the legislation and views or doctrine in the science of law. This paper finds that the KPK is an institution established through a law which carries out its duties and authority independent and free from any power. In carrying out its duties there are inaccuracies and conformity in the process of investigation so that the need for evaluation to carry out duties and authority. Although it is an independent institution, KPK has inhibiting factors in performing its duties such as the limitation of KPK personnel to encompass the entire territory of Indonesia, the rivalry of law enforcers who should become partners and not be rivals against fellow law enforcers and perform their duties in accordance with their respective authorities and spheres law enforcement agencies determined by law, restrictions on tapping rights that are the most effective means of cracking down and being evidence in court that is considered to violate the privacy rights of others, the bad image of the KPK itself that makes the quality fall from the KPK institution.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang memiliki keistimewaan dan pemberian segala kenikmatan besar, baik nikmat iman, kesehatan dan kekuatan di dalam penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya dan penegak sunnah-Nya sampai akhir zaman.

Skripsi ini berjudul “Implementasi Tugas Dan Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Independet Agencies Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Dengan ini menyadari segala kekurangan dan keterbatasan atas kemampuan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, serta segala saran dan kritik maupun masukan lainnya dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan Skripsi ini kearah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis, sehingga penyusunan Skripsi ini tepat waktu, yaitu

1. Bapak Dr. Muh. Yusuf M.Si, selaku Rektor Universitas Bangka Belitung
2. Bapak Syamsul Hadi S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah membantu dan memerikan saran dan motivasinya dalam penulisan karya tulis ini
3. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H.,M.H, Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah motivasinya dalam penulisan karya tulis ini

4. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Dosen Pembimbing Utama Ibu Yokotani, S.H.,M.H dan Dosen pembimbing pendamping Bapak Darwance, S.H.,M.H Terimakasih atas segala upayanya dalam penyempurnaan skripsi ku.
6. Bapak Rahmat Robuawan, S.H.,M.H, saya ucapkan terimakasih banyak atas segala nasehat, motivasi dan waktunya untuk penyelesaian skripsi ku.
7. Seluruh Dosen dan staff Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
8. Rekan-rekan seperjuangan yang telah banyak membantu dan saling memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah khasanah pengetahuan kita semoga Universitas Bangka Belitung ini dapat berkembang dalam kemajuan ilmu pengetahuan.

Pangkalpinang, 28 Mei 2018



Rico Riando

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kerangka Teori.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
BAB II SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, INDEPENDENT AGENCIES	
A. Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	12
B. Komisi Pemberantasan Korupsi.....	28
C. <i>Independent Agencies</i>	36

**BAB III IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI *INDEPENDENT
AGENCIES* DALAM SISTEM KETATANEGARAN
INDONESIA**

- A. Implementasi tugas dan fungsi komisi pemberantasan korupsi sebagai
independent agencies dalam sistem ketatanegaraan indonesia 46
- B. Penghambat implementasi tugas dan fungsi yang membuat komisi
pemberantasan korupsi sebagai *independent agencies*..... 64

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 82
- B. Saran..... 83

DAFTAR PUSTAKA..... 85

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kasus yang ditangani oleh KPK.....	Hlm 52
---	-----------

